



PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

# LKJIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Dalam mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan. Laporan Kinerja yang diharapkan tidak hanya kinerja pemerintah kepada masyarakat tetapi juga kinerja BPPDRD (Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah) Kota Balikpapan kepada Walikota Balikpapan.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPPDRD Kota Balikpapan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LKJIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018.

BPPDRD Kota Balikpapan merupakan salah satu OPD Pemerintah Kota Balikpapan yang menangani urusan Pemerintah mengenai Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana telah banyak memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah, Kota Balikpapan telah dan terus berbenah diri dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Balikpapan tahun 2018 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2018. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2018.

Balikpapan, Desember 2018  
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan,

**Drs. MUHAMMAD NOOR**

NIP. 19611102 198701 1 001



## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI .....	3
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	3
C. ASPEK STRATEGIS .....	4
D. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI .....	4
E. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
F. SUMBER DAYA MANUSIA .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	8
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) .....	8
1. VISI DAN MISI .....	8
2. TUJUAN DAN SASARAN .....	8
3. INDIKATOR KINERJA .....	10
4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	11
5. PROGRAM / KEGIATAN .....	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 .....	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	15
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	16
C. REALISASI ANGGARAN .....	18
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	21
A. KESIMPULAN .....	21
B. SARAN .....	21



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Pengembangan aparatur Negara diarahkan pada makin terwujudnya daya tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan dukungan administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam suatu sistem administrasi Negara yang makin handal, profesional dan strategis.

Dalam merespon perubahan lingkungan strategis di setiap instansi pemerintah, termasuk BPPDRD Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor: 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

#### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah;



- d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihanserta penggalian potensi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. ASPEK STRATEGIS**

1. Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Pajak daerah dan retribusi Daerah;
2. Meningkatnya Pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatnya Kemampuan Aparatur;
4. Terciptanya Pelayanan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.

### **D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI**

Adapun isu strategis yang dihadapi adalah perlunya :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perpajakan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah yang aspiratif, Transparan dan akuntabel;
3. Menggali Potensi dan sumber- sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan Penerimaan pendapatan daerah Serta Akurasi data Potensi Penerimaan Pajak daerah;
4. Optimalisasi peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Balikpapan;
5. Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada masyarakat Kota Balikpapan.



## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2016 maka susunan Organisasi BPPDRD Kota Balikpapan terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang membawahkan:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, yang membawahkan:
  - a. Subbidang Pendataan;
  - b. Subbidang Pendaftaran; dan
  - c. Subbidang Pemeriksaan dan Penetapan.
4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, yang membawahkan:
  - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2;
  - b. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2; dan
  - c. Subbidang BPHTB.
5. Bidang Penagihan dan Pembukuan, yang membawahkan:
  - a. Subbidang Penagihan;
  - b. Subbidang Layanan Keberatan; dan
  - c. Subbidang Pembukuan.
6. Bidang Pengendalian Operasional, yang membawahkan:
  - a. Sub Bidang Perencanaan;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Potensi; dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian Operasional.
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional



## F. SUMBER DAYA MANUSIA

BPPDRD Kota Balikpapan per 31 Desember 2018 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak **107 (Seratus Tujuh)** orang sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	4 Orang
2	Sarjana (S-1)	26 Orang
3	Diploma IV (D4)	~
4	Diploma III (D3)	10 Orang
5	Diploma II (D2)	~
6	Diploma I (D1)	6 Orang
7	SLTA	57 Orang
8	SLTP	~
9	SD	4 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>107 Orang</b>

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah SDM yang dimiliki BPPDRD pada tahun 2018 adalah 107 orang, sedangkan pada tahun 2017 sejumlah 114 orang. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 BPPDRD mengalami penurunan jumlah SDM. Salah satu penyebab adalah adanya mutasi atas pegawai BPPDRD.

Selain itu berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2018 pegawai yang berlatarbelakang Pasca Sarjana mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 3 orang. Hal ini tentunya berpengaruh positif atas hasil kinerja dan kualitas kinerja dari BPPDRD. Namun pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana, Diploma III mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu Sarjana berjumlah 30 orang dan Diploma III berjumlah 11 orang.



**Tabel 1.2 Data Pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	74
2	THL	5
3	NABAN	28

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah PNS lebih banyak dari pada jumlah THL dan Naban.

**Tabel. 1.3. Data Pegawai BPPDRD Kota Balikpapan Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6 orang
2	Golongan III	32 orang
3	Golongan II	35 orang
4	Golongan I	1 orang

Dari tabel 1.3 dapat terlihat bahwa jumlah pegawai dengan golongan III cukup berimbang dengan jumlah pegawai golongan II.

**Tabel. 1.4. Data Pegawai BPPDRD Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin Pegawai	Jumlah
1	Pria	79
2	Wanita	28

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Pria dan Wanita masih belum berimbang.





## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan perencanaan yang dibuat untuk rentang 5 tahun seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004 yang berisi mengenai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta program-program yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Tahun 2018 merupakan tahun ke-3 dalam pelaksanaan Renstra 2016-2021 yang dalam pelaksanaannya tertuang dalam Visi dan Misi berikut.

##### 1. Visi dan Misi

**Visi** merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka Visi BPPDRD Kota Balikpapan adalah :

***“MENJADI PERANGKAT DAERAH YANG PROFESSIONAL  
DALAM MENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”***

**Misi** untuk mewujudkan visi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok maka ditetapkanlah misi BPPDRD Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
2. **Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
3. **Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;**
4. **Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat.**

##### 2. Tujuan Dan Sasaran

**Tujuan** merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing



misi. Tujuan BPPDRD Kota Balikpapan yang telah disusun dalam Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1 Tujuan BPPDRD Kota Balikpapan**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan
2	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi daerah	- Presentase Kenaikan Pajak Daerah - Presentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak) - Presentase Kenaikan Retribusi daerah
3	Mewujudkan aparatur yang berkompeten dibidangnya	Tingkat Kualitas aparatur
4	Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat

**Sasaran** merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran BPPDRD Kota Balikpapan yang telah dirumuskan di dalam Renstra 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2 Sasaran BPPDRD Kota Balikpapan**

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan
2	Meningkatnya Pajak daerah dan Retribusi daerah	- Presentase Kenaikan Pajak Daerah - Presentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak) - Presentase Kenaikan Retribusi daerah
3	Meningkatnya kemampuan	Tingkat Kualitas aparatur



	aparatur	
4	Terciptanya Pelayanan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat

### 3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun indikator kinerja utama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2018**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan		Nilai Pajak Daerah		382,6 M	757,800,000	396 M	833,580,000	409,9 M	916,938,000	424,3 M	1,008,631,800 M	439,2 M	1,109,494,980	454,6 M	1,220,448		
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)	Program Peningkatan dan Peningkatan	Daerah															
	Presentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Wajib Pajak Daerah	WP	16528	844,426,500	330	928,869,150	330	975,312,608	330	1,024,078,238	330	1,075,282,150	330	1,129,046,257		
	Presentase Kenaikan Retribusi Daerah	Peningkatan Objek PBB-P2	OP	144403	1,820,193,000	720	2,002,212,300	500	2,102,322,915	500	2,207,439,061	500	2,317,811,014	500	2,433,701,564			
Meningkatkan Kemampuan Aparatur	Tingkat Kualitas Aparatur	Program Peningkatan	Manajemen	Orang	52	1,094,980,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000		

**Kebijakan** BPPDRD dalam melaksanakan fungsinya melakukan kebijakan yaitu :



Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kapasitas Sumban Masyarakat	kuaitas SD Mpegawai															

#### 4. Strategi Dan Kebijakan

Strategi menjelaskan pemikiran – pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah – langkah/upaya – upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

**Strategi** BPPDRD Kota Balikpapan adalah :

- Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang transparan dan akuntabel;
- Meningkatkan efektifitas operasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Memberlakukan Pembayaran secara *on-line*;
- Mengintensifkan penagihan terhadap WP/RD;
- Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat/ Wajib Pajak akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan kota;
- Peningkatan Mutu dan Pengetahuan Pegawai;
- Penyempurnaan Produk Hukum Daerah terkait pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- Penyempurnaan Sistem, Tata Kerja dan Hubungan Kerja;
- Mewujudkan dan memenuhi Standar Pelayanan.

**Kebijakan** BPPDRD dalam melaksanakan fungsinya melakukan kebijakan yaitu :



- a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan operasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Wajib Pajak;
- d. Monitoring dan Evaluasi terhadap Laporan Pajak dan Tagihan WP/RD;
- e. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat/ Wajib pajak secara bertahap dan berkesinambungan;
- f. Peningkatan Mutu dan Pengetahuan Pegawai Tentang perpajakan;
- g. Optimalisasi peran salah satu Bidang untuk sosialisasi kepada aparatur lainnya;
- h. Penyempurnaan produk hukum Daerah Terkait pajak daerah dan retribusi daerah ;
- i. Penyempurnaan System, Tata kerja dan Hubungan kerja;
- j. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala;
- k. Monitoring dan Evaluasi hasil Survey
- l. Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal.

**5. Program / Kegiatan BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2018**

BPPDRD di Tahun 2018 Melakukan 4 (Empat) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Program Kegiatan BPPDRD Tahun 2018 Anggaran Murni dan Setelah Perubahan**

KODE		URAIAN	JUMLAH (Rp)	
PROG RAM	KEGIA TAN		ANGGARAN MURNI	SETELAH PERUBAHAN
1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,980,651,400.00</b>	<b>1,980,651,400.00</b>
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	104,891,600.00	104,891,600.00
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	65,000,000.00	65,000,000.00
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24,145,800.00	24,145,800.00
	10	Penyediaan alat Tulis Kantor	198,042,500.00	198,042,500.00
	11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	472,320,000.00	472,320,000.00
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	154,740,000.00	154,740,000.00
	18	Rapat- rapat Koordinasi, Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah	300,000,000.00	299,534,880.00
	19	Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran	661,511,500.00	661,976,620.00



2		<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>335,261,000.00</b>	<b>335,261,000.00</b>
	24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	185,761,000.00	185,761,000.00
	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	149,500,000.00	149,500,000.00
17		<b>Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>8,404,327,200.00</b>	<b>7,154,327,200.00</b>
	23	Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	1,011,760,000.00	1,011,760,000.00
	24	Operasional SIMPATDA Pajak daerah	350,000,000.00	350,000,000.00
	25	Peningkatan Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	60,700,000.00	60,700,000.00
	26	Operasi Sisir dan Pengawasan Objek Pajak Daerah	276,000,000.00	276,000,000.00
	27	Pengumpulan Data Penghapusan Piutang PBB-P2	149,999,200.00	149,999,200.00
	28	Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB	100,000,000.00	100,000,000.00
	30	Operasional Pelayanan Pajak Daerah	87,043,000.00	87,043,000.00
	31	Updating Data Peta PBB-P2	-	400,000,000.00
	49	Pengendalian Operasional Pajak Daerah	400,000,000.00	400,000,000.00
	53	Pengembangan Potensi Pajak Daerah Kota Balikpapan	318,825,000.00	318,825,000.00
	54	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan	150,000,000.00	150,000,000.00
	56	Pendamping Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00
	131	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah	5,000,000,000.00	3,350,000,000.00
23		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>376,425,000.00</b>	<b>376,425,000.00</b>
	6	Operasional Aplikasi Payment Online	376,425,000.00	376,425,000.00
		<b>JUMLAH</b>	<b>11,096,664,600.00</b>	<b>9,846,664,600.00</b>

## B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

Yang ingin dicapai BPPDRD Kota Balikpapan tahun 2018 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut.

**Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan 2018**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	~ Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	0.16%
		~ Persentase Kenaikan Retribusi Daerah	4.04%
2	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang prima	~ Indeks Kepuasan Masyarakat	79,6 (Baik)

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang berisikan sasaran, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Yang dapat dilihat pada tabel 2.6 untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	0.16%
		2. Persentase Kenaikan Retribusi Daerah	4.04%
2.	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,6 (Baik)

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 8,404,327,200.00	APBD Murni
2	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Rp 376,425,000.00	APBD Murni
3	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 1,980,651,400.00	APBD Murni
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 335,261,000.00	APBD Murni
	<b>TOTAL</b>	Rp 11,096,664,600.00	APBD Murni

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja dengan menggunakan Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang dilanjutkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja 2018. Adapun dalam menghitung tingkat capaian kinerja yaitu membandingkan antara Realisasi dengan Target.

Pencapaian sasaran BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**

**Pencapaian sasaran BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1		2	4	5	6
1	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	491,114,106,750.00	474,993,322,677.30	96.72%
		Persentase Kenaikan Retribusi Daerah	70,885,893,250.00	55,064,970,513.39	77.68%
2	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.6	81.88	103%

Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa capaian dari sasaran meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah untuk indikator kinerja penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 mencapai 96,72% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk capaian dari indikator penerimaan retribusi daerah yang diperoleh adalah 77,68% dari target yang telah ditentukan. Dan capaian atas sasaran terciptanya pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang prima dari indikator berupa indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh adalah 103% dari target yang telah ditentukan sebelumnya.



**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

1. Sasaran : Meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah

**Tabel 3.2**

**Realisasi atas Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Murni	Realisasi	%
1		2	4	5	6
1	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	492.614.106.750,00	474.993.322.677,30	96,42%
		Persentase Kenaikan Retribusi Daerah	70.885.893.250,00	55.064.970.513,39	77,68%

Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 berjumlah 474.993.322.677,30 memiliki kenaikan 5,5% dari realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2017 yang berjumlah 450.213.740.232,52. Sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2018 yang berjumlah 492.614.106.750 terdapat kenaikan sejumlah 17,57% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2017 yaitu 419.000.000.000,-.

Adanya peningkatan target yang ditetapkan dikarenakan melihat potensi-potensi pajak daerah yang masih belum diperhitungkan. Adapun persentase capaian penerimaan pajak daerah tahun 2018 terhadap target tahun 2018 dapat dikatakan menurun dibandingkan dengan persentase capaian penerimaan pajak daerah tahun 2017 terhadap target tahun 2017. Yang mana pada tahun 2017 persentase capaian penerimaan pajak daerah mencapai 107%. Hambatan yang dihadapi salah satunya adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, selain itu kurangnya tenaga petugas lapangan untuk melakukan upaya updating data dan melakukan upaya penagihan untuk PBB-P2.

2. Sasaran : Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima

Indeks kepuasan masyarakat merupakan sebuah gambaran dari hasil pelayanan yang telah diberikan BPPDRD kepada wajib pajak. Didapatnya

nilai indeks kepuasan masrakat dengan memperhitungkan nilai rata-rata unsur-unsur pelayanan yang telah ditentukan oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi atas Indeks Kepuasan Masyarakat BPPDRD Tahun 2018**

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1		2	4	5	6
2	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.6	81.88	103%

Berdasarkan tabel 3.3 nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2018 yang diperoleh BPPDRD dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan adalah 81,88. Pada tahun 2017 nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh BPPDRD adalah 79,55 terdapat peningkatan nilai sejumlah 2,93% atas hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2017. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 memiliki capaian sejumlah 103% terhadap target yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2016-2021. Target capaian IKM untuk tahun 2018 yang telah ditetapkan adalah 79,6. Nilai rata-rata yang diperoleh BPPDRD berdasarkan unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018**  
**Berdasarkan Unsur Pelayanan**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Kesesuaian Persyaratan	3.247
2	Kemudahan Prosedu Pelayanan	3.187
3	Kesesuaian Waktu Pelayanan	3.180
4	Komitmen Anti Pungli	3.240
5	Kesesuaian Produk Layanan	3.320
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.300
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3.353
8	Penanganan Pengaduan	3.387
9	Fasilitas Sarana dan Prasarana	3.233
10	Ketetapatan Waktu Penerbitan Dokumen Kepegawaian	3.307

Adapun unsur-unsur pelayanan yang mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi pada tahun 2018 adalah unsur pelayanan penanganan pengaduan dengan nilai rata-rata 3,39. Sedangkan pada tahun 2017 unsur pelayanan yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah unsur pelayanan tanggapan petugas pelayanan mengenai aduan/keluhan dengan nilai rata-rata 3,51.

Selain itu unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah adalah unsur pelayanan kesesuaian waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 3,18. Sedangkan pada tahun 2017 yang memiliki nilai terendah adalah unsur pelayanan ketersediaan sarana pengaduan, saran dan masukan dengan nilai rata-rata 3,08. Adapun hasil indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2018**  
**berdasarkan unsur pelayanan dengan nilai Tertinggi dan Terendah**

No.	Keterangan	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai IKM
1	Unsur Pelayanan dengan nilai tertinggi	Penanganan Pengaduan	3.387	81.88
2	Unsur Pelayanan dengan nilai terendah	Kesesuaian Waktu Pelayanan	3.180	

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja maka BPPDRD Kota Balikpapan tahun 2018 merancang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sasaran di renstra tahun 2016-2021. Untuk mendukung maka disusunlah anggaran-anggaran berupa Anggaran Belanja Administrasi Umum, Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Anggaran Belanja Modal.

Anggaran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Balikpapan. Adapun besarnya anggaran yang tertuang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini.



**Tabel 3.6 Anggaran belanja BPPDRD tahun 2018**

No	Uraian	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi	Persentase
1	Belanja Tidak Langsung	27,180,575,000.00	26,637,218,000.00	25,442,869,829.45	96%
2	Belanja Langsung	11,096,664,600.00	9,846,664,600.00	6,984,138,256.00	71%
	Total	38,277,239,600.00	36,483,882,600.00	32,427,008,085.45	89%

Jumlah Belanja tidak langsung yang dianggarkan pada tahun 2018 sejumlah 27.180.575.000,- yang kemudian dilakukan perubahan mejadi 26.637.218.000,-. Jumlah belanja langsung pada tahun 2018 adalah 11.096.664.600,- yang kemudian dilakukan perubahan menjadi 9.846.664.600,-.

Adapun realisasi dari belanja langsung yaitu sejumlah 25.442.869.829,45 atau sejumlah 96% dari pagu yang telah di anggarkan. Sedangkan realisasi belanja langsung tahun 2018 adalah 6.984.138.256,- atau sejumlah 71% dari pagu belanja lansung yang telah di anggarkan.

Terdapat 4 program dengan 23 kegiatan yang di anggarkan sebelumnya pada tahun 2018 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi 4 program dengan 24 kegiatan. Adapun penganggaran dan realisasi belanja kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

**Tabel 3.7 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018**

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi s/d DESEMBER					
			Total		BLP		BLNP	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.1.01.1..001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,980,651,400.00	1,832,832,440.00	85.29	642,357,480.00	97.00	1,190,474,960.00	73.16
001.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	104,891,600.00	95,033,233.00	90.60	-	-	95,033,233	90.60
001.0006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	65,000,000.00	23,271,700.00	35.80	-	-	23,271,700	35.80
001.0008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24,145,800.00	24,010,800.00	99.44	-	-	24,010,800	99.44
001.010.	Penyediaan alat Tulis Kantor	198,042,500.00	196,728,400.00	99.34	-	-	196,728,400	99.34
001.011.	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	472,320,000.00	455,372,914.00	96.41	-	-	455,372,914	96.41
001.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	154,740,000.00	100,761,000.00	65.12	-	-	100,761,000	65.12
001.018.	Rapat- rapat Koordinasi, Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah	299,534,880.00	295,296,913.00	98.59	-	-	295,296,913	98.59
001.019.	Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran	661,976,620.00	642,357,480.00	97.04	642,357,480	97.00	-	-
0.1.01.1..002	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	335,261,000.00	167,755,550.00	47.58	-	-	167,755,550	47.58



**BPPDRD KOTA BALIKPAPAN**

002.024.	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	185,761,000.00	130,544,750.00	70.28	-	-	130,544,750	70.28
002.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	149,500,000.00	37,210,800.00	24.89	-	-	37,210,800	24.89
0.3.00.03..17	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7,154,327,200.00	4,617,419,666.00	58.93	757,779,000	46.88	3,859,640,666	52.78
17.023.	Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	1,011,760,000.00	794,877,000.00	78.56	724,719,000	69.75	70,158,000	6.93
17.024.	Operasional SIMPATDA Pajak daerah	350,000,000.00	349,295,400.00	99.80	-	-	349,295,400	99.80
17.025.	Peningkatan Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	60,700,000.00	60,357,000.00	99.43	-	-	60,357,000	99.43
17.026.	Operasi Sisir dan Pengawasan Objek Pajak Daerah	276,000,000.00	198,082,850.00	71.77	-	-	198,082,850	71.77
17.027.	Pengumpulan Data Penghapusan Piutang PBB-P2	149,999,200.00	107,925,233.00	71.95	-	-	107,925,233	71.95
17.028.	Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB	100,000,000.00	92,804,750.00	92.80	-	-	92,804,750	92.80
17.030.	Operasional Pelayanan Pajak Daerah	87,043,000.00	5,532,800.00	6.36	-	-	5,532,800	6.36
17.031.	Updating Data Peta PBB-P2	400,000,000.00	127,097,678.00	31.77	33,060,000	24.00	94,037,678	23.51
17.049.	Pengendalian Operasional Pajak Daerah	400,000,000.00	99,724,950.00	24.93	-	-	99,724,950	24.93
17.053.	Pengembangan Potensi Pajak Daerah Kota Balikpapan	318,825,000.00	47,270,260.00	14.83	-	-	47,270,260	14.83
17.054.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan	150,000,000.00	35,817,865.00	23.88	-	-	35,817,865	23.88
17.056.	Pendamping Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	500,000,000.00	407,783,380.00	81.56	-	-	407,783,380	81.56
17.131	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah	3,350,000,000.00	2,290,850,500.00	68.38	-	-	2,290,850,500	68.38
0.1.02.10..23	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi	376,425,000.00	366,130,600.00	97.27	-	-	366,130,600.00	97.27
23.0006.	Operasional Aplikasi Payment Online	376,425,000.00	366,130,600.00	97.27	-	-	366,130,600.00	97.27
<b>Total</b>		<b>9,846,664,600.00</b>	<b>6,984,138,256.00</b>	<b>72.27</b>	<b>1,400,136,480.00</b>	<b>35.97</b>	<b>5,584,001,776.00</b>	<b>67.70</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPPDRD Kota Balikpapan, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018. LKJIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Kota Balikpapan.

Dari 2 (Dua) sasaran di tahun 2018, dapat dikatakan telah tercapai dengan baik. Untuk Indikator pencapaian sasaran yang belum tercapai 100%, di masa mendatang akan diupayakan kerja keras dan semangat yang tinggi dari seluruh jajaran BPPDRD Kota Balikpapan, dukungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi terkait serta masyarakat untuk meningkatkan Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan.

Namun di samping keberhasilan yang telah dimiliki oleh BPPDRD Kota Balikpapan tersebut diatas, juga tidak lepas dari kendala – kendala yang ada, diantaranya adalah :

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai ;
2. SDM ;
  - a. Belum Optimal Pendidikan dan Pelatihan bagi staf untuk meningkatkan profesionalisme;
  - b. Masih kurang efektifnya atas pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di BPPDRD.
3. Belum adanya kerangka yang jelas mengenai inovasi, dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah

### **D. SARAN**

Upaya yang dilakukan BPPDRD Kota Balikpapan dalam menghadapi kendala – kendala yang ada :

- a. Meningkatkan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD terutama dalam rangka peningkatan SDM;



- b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui workshop, sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan elektronik;
- c. Mengadakan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan;
- d. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas / Unit Kerja terkait dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara optimal;
- e. Penungguan dan Peninjauan Lapangan ke Objek Pajak;
- f. Melakukan monitoring / penagihan dan teguran langsung terhadap wajib pajak yang belum membayar / melunasi pajak daerah;
- g. Melakukan pemeriksaan ke lokasi atas permohonan keberatan dan angsuran;
- h. Menggali Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good and Clean Government* yang melibatkan *stake holders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

“ Balikpapan Ku Bangun, Ku Jaga dan Ku Bela, Ku Bangun dengan Amal, Ku Jaga dengan Iman dan Ku Bela dengan Doa “.

Balikpapan, Desember 2018  
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

**Drs. MUHAMMAD NOOR**

NIP. 19611102 198701 1 001



- d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui workshop, seminar Pajak Daerah melalui media cetak dan elektronik;
  - e. Mengadakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
  - f. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Unit kerja terkait dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga kebermanfaatan komisioner dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
  - g. Peningkatan dan Peninjauan Laporan ke Objek Pajak;
  - h. Melakukan monitoring / pengalihan dan teguran langsung terhadap wajib pajak yang belum menyetor / melunasi pajak daerah;
  - i. Melakukan pemeriksaan ke lokasi atas permohonan keberatan dan keberatan;
  - j. Menggali Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Demikian disampaikan Laporan Kinerja Insan Pemerintah Balikpapan yang dapat memenui pelaksanaan Good and Clean Government yang melibatkan stake holders, sehingga ke depan akan tercipta suasana dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.
- \* Balikpapan ke Bagan, ke Jaga dan ke Belu, ke Bangun dan ke Aman, ke Jaga dengan Iman dan ke Belu dengan Das

**DR. MURAHAD MOOR**  
 NIP. 19511102 198701 1 001